

SISTEM PEMETAAN PROGRAM RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA BERBASIS *DISTRICT PLANNING SUPPORT SYSTEM (DPISS)* DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH

ABSTRAK

Sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam proposal, penelitian ini bertujuan bertujuan menemukan sistem pemetaan program Rencana Strategis Pembangunan Bidang Pendidikan berbasis data dalam bentuk *Software District Planning Support System (DPISS)*. Melalui Tahapan strategis dalam penelitian ini dengan metode yang digunakan maka diperoleh beberapa temuan dan produk penelitian yang mencakup: (a) Model kebijakan dalam pemikiran tentang tahapan perumusan renstra SKPD Kabupaten Kota Berbasis Data ; (b) Model disain software database pendidikan yang dikembangkan melalui sistem perancangan model pemetaan sejumlah program Renstra Dinas Pendidikan untuk multi tahun yang dapat menyempurnakan kebutuhan stakeholder SKPD dinas pendidikan, khususnya tim renstra dan bagian perencanaan serta data dan informasi; (c) Diperolehnya hasil disain, pengembangan dan ujicoba Software Sistem Pendataan Program Renstra SP2Renstra Berbasis DPISS (*District Planning Information Support System*) yang mampu memenuhi kebutuhan software pemetaan data untuk pengembangan program kegiatan rencana strategis dinas pendidikan Kabupaten Kota.

Kata Kunci: *SP2Renstra Berbasis (DPISS)*

PENDAHULUAN

Kebutuhan sistem pendukung proses pemetaan digital data dan informasi yang akan menjadi dasar pemetaan program-program pengembangan pendidikan di lingkungan dinas pendidikan kabupaten ini sangat dinantikan. Terutama seklai upaya inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang ini banyak dilakukan oleh para praktisi, antara ilmuwan dan peneliti akademis. Sebagai salah satu upaya inovasi ini telah dilakukan melalui penelitian yang telah menghasilkan sistem pemetaan Renstra pengembangan program dengan sistem perangkat lunak pendidikan berdasarkan Informasi Perencanaan Kabupaten Support System (DPISS). Melalui perangkat lunak yang dirancang berdasarkan hasil survey, penelitian opini pihak dinas pendidikan semua perlu untuk memetakan sejumlah program dalam Renstra pelayanan kabupaten / kota bisa dilakukan secara akurat. Disign Studi dan pembangunan berdasarkan semangat otonomi daerah, yang sampai sekarang otoritasnya dalam menjalankan pengelolaan data dan informasi masih merasa optimal bagi semua. Penelitian ilmiah yang dilakukan tim gabungan dari ini, fokus secara terpadu pada beberapa fokus penelitian meliputi:

- 1) Upaya untuk menganalisis kebutuhan sistem pemetaan program dinas pendidikan.
- 2) Mengembangkan sistem desain sistem database yang dapat mendukung proses pemetaan sejumlah Departemen Pendidikan Rencana Strategis program yang multi-tahun.
- 3) Desain, mengembangkan dan mendistribusikan perangkat lunak dan mencoba Sistem Pengumpulan Data Berencana DPISS atau SP2 berbasis Rencana Strategis untuk memetakan program-program Departemen Pendidikan.

Dari fokus penelitian ini adalah pengembangan model-model produksi dan software pemetaan dilakukan, bahkan dua produk ini sangat praktis dan cukup untuk berkontribusi pada kesiapan dan kinerja dari perencanaan tingkat productivity dan data-informasi di lingkungan dinas pendidikan kabupaten kota subjek penelitian daerah di Jawa Barat.

II. KAJIAN PUSTAKA

a. Konsep Otonomi Daerah

Desentralisasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana urusan pemerintah pusat diserahkan kepada mengoperasikan unit-unit organisasi pemerintah daerah dalam apa yang disebut sebagai daerah otonom. (Salam 2004:89). Dalam UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1 menyatakan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Republik Indonesia. Berlakunya UU No 32 Tahun 2004 mensyaratkan pelaksanaan otonomi daerah dan perspektif dalam pendidikan demokratis. Ini diikuti oleh perubahan dalam pengelolaan pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi alam.

McGinn dan Welsh (1999: 8-9) dalam "Desentralisasi Pendidikan: Mengapa, Kapan, Apa, dan Bagaimana?" Menulis bahwa desentralisasi merupakan fenomena yang sangat penting yang mempengaruhi perencanaan sektor pendidikan dalam lima belas tahun. Tanggapan dikeluarkan bisa sangat beragam, termasuk sejauh itu dapat meningkatkan efisiensi dalam manajemen dan tata kelola pendidikan. McGinn dinyatakan T Welsh (1999: 8-9), bahwa:

Decentralization is one of the most important phenomena to have affected educational planning in the last 15 years. Respons for decentralization are numerous. In some cases it is a questioning of increasing efficiency in management and governance. It also helps in clarifying lines of accountability, increasing transparency, and allows for mobilization of resources at the local level, through community participation that would be available. (p 8-9).

Aspek akuntabilitas Transfarancy demikian dalam praktek otonomi daerah ini masih memerlukan perangkat yang berbeda akan suplemen pelaksanaan program kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

b. Rencana Strategis Pendidikan Kab / Kota

Penelitian tentang kebijakan penting dalam persiapan pelaksanaan otonomi daerah termasuk otonomi pendidikan adalah program studi yang dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis Departemen Pendidikan 2005-2009. Sebagai salah satu tes dan analisis tujuan program yang diluncurkan sehingga penelitian ini mencoba untuk mengkritik salah satu program yang ada di sasaran. Upaya ini untuk menggambarkan masukan bagi Departemen Pendidikan Nasional untuk tingkat sasaran pelaksanaan program. Analisis program finded titik H. Yaitu Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Program ini bertujuan untuk: meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga di tingkat nasional dan mekanisme regional untuk mengembangkan tata pemerintahan yang baik, meningkatkan koordinasi antara tingkat pemerintahan, pengembangan kebijakan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan;. (2) Pengembangan dan pelaksanaan sistem pengendalian pembangunan pendidikan termasuk pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan; (3) perbaikan manajemen pendidikan dengan meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan kepada pengelola pendidikan dan satuan pendidikan dalam melaksanakan pendidikan yang efektif dan efisien, transparan, bertanggung jawab , akuntabel dan partisipatif, yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Jika dianalisis dari Diknas poin deskripsi tujuan program strategis di atas, maka salah satu dari mereka bahwa Departemen Pendidikan SKPD Kabupaten / kota satu harus mampu menunjukkan kapasitas mereka. Mulai dari perencanaan, pemetaan program, pelaksanaan program, evaluasi dan evaluasi program desentralisasi pendidikan. Ini berarti bahwa ada kebutuhan suplemen dalam bentuk

sistem pemetaan sebagai program khusus yang akan dibangun melalui penelitian ini diperlukan. Jika sebuah kab / kota berhasil menciptakan sebuah sistem yang memfasilitasi tahap-tahap perencanaan pengembangan otonomi di bidang pendidikan maka ini akan mendukung Program Strategis Nasional Departemen Pendidikan Nasional. Hal ini sangat relevan dengan apa yang dinyatakan pada beberapa langkah-langkah kegiatan ini akan dilaksanakan melalui Rencana Strategis ini adalah: (1) penataan dan penataan ulang manajemen pendidikan di era desentralisasi; (2) persiapan sistem dan mekanisme untuk perencanaan dan pengelolaan pendidikan di era desentralisasi ... (Sumber: Rencana Strategis Tahun 2005-2009, hal. 86).

III. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian strategis nasional ini adalah hasil pemetaan model dan perangkat lunak pemetaan data pendukung dan informasi yang diperlukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota .. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

- a) akuisisi analisis kebijakan negara otonomi daerah kabupaten / kota piloting khususnya di bidang pendidikan;
- b) Database akuisisi Model for Software Design DPISS program pemetaan yang siap untuk input, proses, output dan analisa informasi yang dihasilkan oleh Departemen Pendidikan data dan informasi;
- c) Apakah proses pemetaan dan penyusunan program pengembangan sektor pendidikan selama beberapa tahun (4 tahun) atas dasar suatu sistem database menjadi DPISS keluaran Program Tes Umum hasil pemetaan dengan stakeholder dan para pakar tentang otonomi daerah kabupaten / kota piloting ;
- d) Pelaksanaan replikasi berbasis sistem pemetaan untuk keperluan pemetaan DPISS program pembangunan pendidikan di seluruh kabupaten / kota di Indonesia sebagai salah satu bentuk praktek pendidikan dalam kerangka otonomi Otonomi Daerah.

IV. METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Garut, Karawang, Bogor dan Sukabumi. Riset lama ini sekitar 8 bulan dengan asumsi bahwa adalah mungkin lama studi yang dilakukan oleh Penelitian dan Pengembangan pendekatan untuk menghasilkan model dan pemetaan desain dan produksi perangkat lunak Sistem Pemetaan Berencana (SP2RENSTRA) tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten. Beberapa data dan informasi yang diperoleh selama studi ini dari tim peneliti selama wawancara, observasi dan studi dokumentasi dokumen Renstra kurikulum dinas pendidikan yang bersangkutan. Data dan informasi dianalisis dan diproses sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan mulai dari analisis menggunakan tahap pengurangan data, validasi dan penjelasan, untuk menjadi langkah dasar dalam merumuskan model pemetaan dan masukan ke dalam desain, produksi, dan pengujian perangkat lunak dan meningkatkan SP2RENSTRA . Visual tahap penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

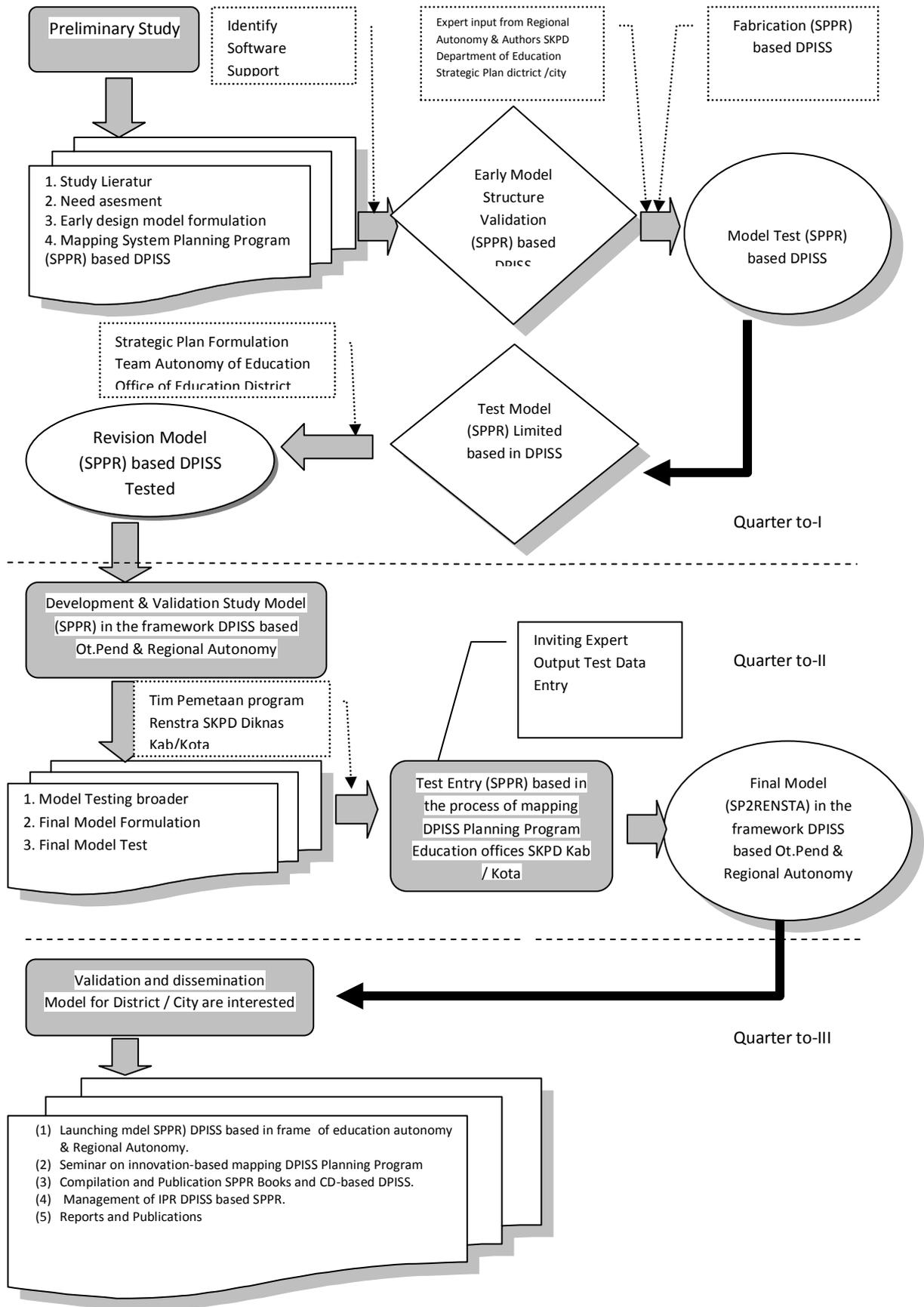


Chart-1 Research Steps: Research and Development

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari studi ini diperoleh tiga temuan utama dalam kaitannya dengan model pemetaan program Renstra, desain sistem database, dan produk SP2Renstra pendidikan Departemen Pendidikan kabupaten. Berikut ini adalah deskripsi dari tiga temuan.

1. Model Program Pemetaan Dinas Pendidikan Rencana Strategis.

Dari model, tim peneliti untuk mengembangkan lagi berdasarkan hasil diskusi dan wawancara dengan tim dinas pendidikan, menunjukkan bahwa tahap perumusan Renstra ini program meliputi:

- a. Analisis Kondisi Real Layanan Pendidikan
 1. Analisis Profil Layanan Pendidikan.
 2. Analisis kemajuan Previous Perencanaan Periode.
 3. Masalah utama Definisi.
- b. Mempersiapkan Visi dan Misi.
 1. Mempersiapkan Visi
 2. Menyiapkan Misi.
 3. Menyiapkan Tata Nilai.
- c. Merumuskan Tujuan dan Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.
 1. Merumuskan Tujuan dan Sasaran
 2. Merumuskan Strategi.
 3. Merumuskan Kebijakan
- d. Merumuskan Program dan Kegiatan.
 1. Merumuskan program.
 2. Merumuskan Kegiatan.

Keempat tahapan dalam penelitian ini adalah bahwa fokus adalah bagian keempat adalah merumuskan program dan kegiatan yang harus berdasarkan data yang dipetakan kondisi. Dari sistem pendataan kondisi yang sudah ada kabupaten / kota maka itulah yang akan menjadi dasar kegiatan pemetaan apa yang lebih dibutuhkan dan prioritas untuk segera dan penganggaran diformulasikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan pendidikan secara keseluruhan. Dari model ini tim peneliti kemudian diuji coba pada beberapa stakeholder kabupaten / kota lingkungan dinas pendidikan dan ada beberapa revisi tambahan, khususnya untuk aspek-aspek dari komponen sistem pengumpulan data. Dalam hal ini para peneliti menyimpulkan, input dan mencoba untuk mendesain ulang kembali ke gambar di bawah ini.

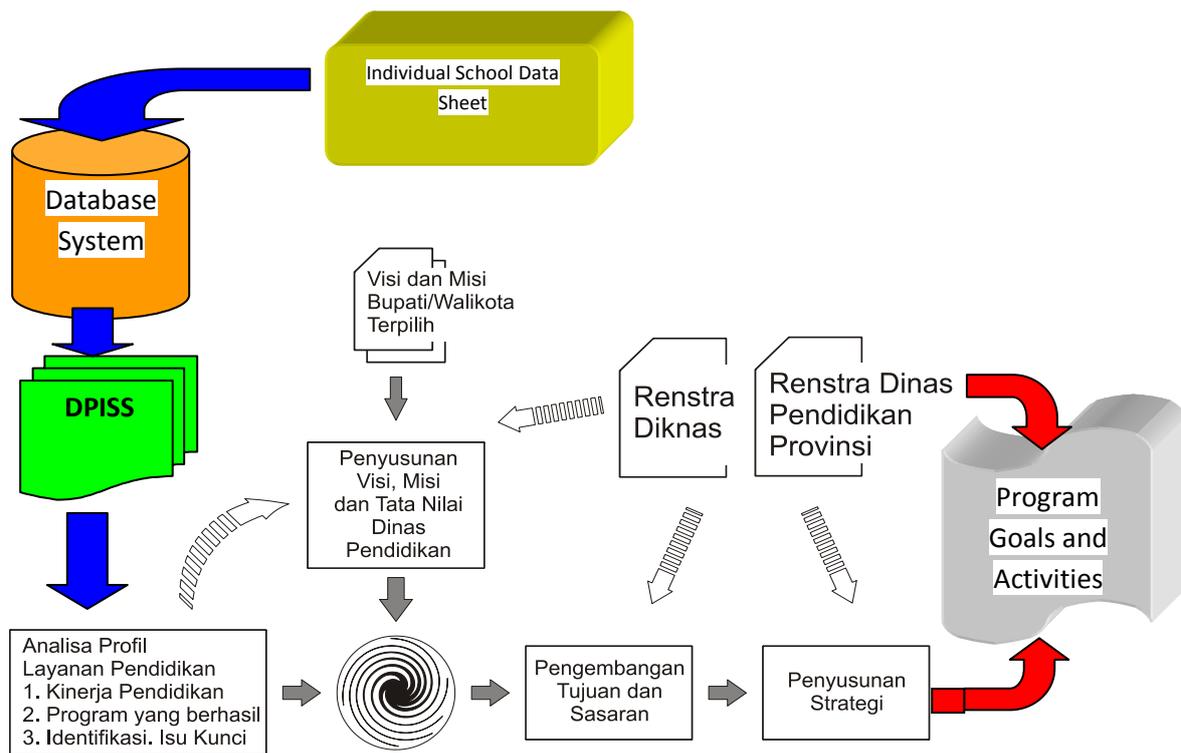


Figure-2 End Model Based Mapping System for Model-Based Development Planning DPIS regency / city

Dari hasil model ini ada satu pertanyaan yang belum terjawab, sistem database model yang dapat membantu perangkat lunak yang dimiliki oleh Kabupaten / kota yang sekarang Informasi Kabupaten Perencanaan Support System (DPIS). Ini berarti bahwa sebelum DPIS, kemudian SKPD kabupaten / kota masih memerlukan entri data sistem dapat secara online / offline untuk entri data input mentah dengan mudah. Berdasarkan temuan ini model tim peneliti kemudian mengembangkan desain sistem database adalah yang pertama dari beberapa produk analisis kabupaten / kota mengenai perumusan dan sasaran kegiatan program yang telah ada. Tim ini lakukan pada tahap berikutnya penelitian, terutama dalam menjawab kedua perumusan masalah penelitian sebagai berikut.

2. Temuan di Desain Database Sistem Program Pemetaan Rencana Strategis Departemen Pendidikan di Kabupaten / Kota.

Dari temuan dari model kerangka berpikir dalam pengembangan Rencana Strategis Departemen Pendidikan telah membuktikan bahwa dasar dan menjadi sistem database dalam mengembangkan desain model. Sebagaimana dijelaskan dalam temuan di atas, para peneliti kemudian mencoba melakukan analisis kebutuhan sistem database yang relevan dengan kebutuhan pengolahan data dalam program pemetaan ini dimaksudkan Renstra. Dari temuan penelitian yang berasal dari data lapangan melalui pengujian dan revisi sistem database ini dapat ditunjukkan bahwa model dapat disepakati adalah sebagai berikut.

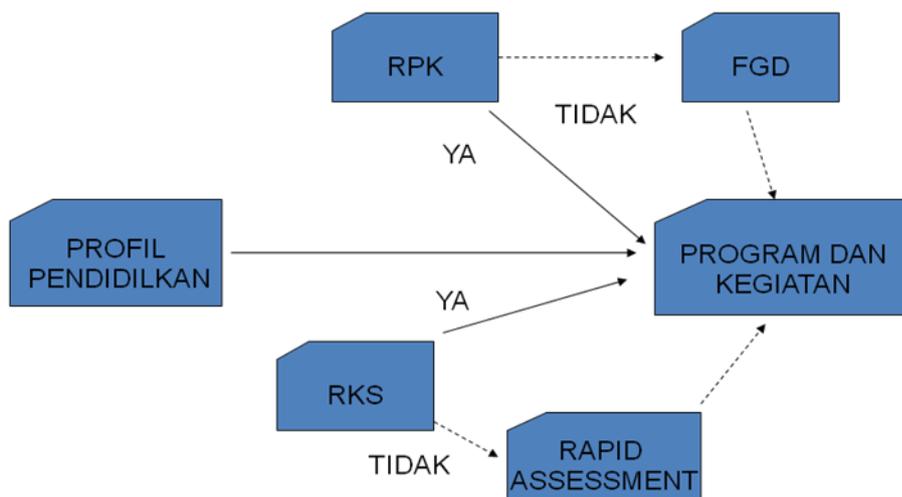


Figure-3 Fundamentals of Database Systems design.

Dengan model jumlah program dan kegiatan yang dapat dipetakan ke database yang didasarkan melengkapi analisis penilaian kebutuhan cepat, serta mengambil kebijakan dasar profil pendidikan tingkat kecamatan.

3. Software Design and Development dukungan SP2RENSTRA Strategis Program Pemetaan Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota.

Dari temuan-temuan sebelumnya tentang database dasar pembangunan untuk entri data yang dapat dilepaskan output untuk menetapkan kebijakan program-program kegiatan menarik untuk setiap tingkat tertentu dan skala dari setiap program, berikut adalah desain dan pengembangan perangkat lunak disebut sebagai tahap SP2Renstra (Perencanaan Sistem Pemetaan program). Prosedurnya pengembangan perangkat lunak SP2Renstra ikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Tabel Analisis Algoritma.
- b) Desain Interface.
- c) Desain Table for Raw Input data berdasarkan desain keterkaitan entri tabel data antara keterkaitan individu sekolah, desa, kecamatan, Kabupaten.
- d) Desain keterkaitan antara tabel grafik yang dihasilkan output untuk total data.
- e) Desain tampilan output yang mudah sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan.

Lunak SP2Renstra diuji untuk mengembangkan di kab / kota mengenai hal ini kepada Departemen Pendidikan, khususnya diadili oleh dan Data Informasi Perencanaan Program. Hasil tes dari temuan-temuan dari perangkat lunak ini, maka masukan yang diperoleh dari revisi kumulatif, khususnya yang berkaitan dengan aspek-aspek sebagai berikut:

- a) tingkat kemudahan perangkat lunak sistem operasi SP2RENSTRA Rencana Strategis dalam mendukung proses entri data.
- b) tingkat Readability Strategis dilihat SP2 perangkat lunak dari peta kapasitas program Renstra.
- c) Power Dukungan perangkat lunak SP2Renstra efektivitas dan efisiensi kerja.
- d) Tingkat pemenuhan harapan operator / user.
- e) Kontribusi dalam output data kebutuhan untuk meningkatkan program KB.
- f) Sarana pelayanan proses entri yang dapat perangkat lunak.

- g) SP2Renstra Kredibilitas perangkat lunak untuk mendukung penyusunan Rencana Strategis tugas tim.
- h) Kelengkapan SP2renstra output yang dihasilkan dari perangkat lunak.
- i) Pencarian mesin pencari atau format SP2 renstra data dalam perangkat lunak.
- j) Disdik Harapan dari kinerja tim pengembangan perangkat lunak pemetaan SP2renstra dalam mendukung program-program dalam Renstra pendidikan masa depan.

Dari hasil penelitian tentang berbagai SP2Renstra kemudahan penggunaan dari software ini maka software ini diharapkan dapat dimiliki dan digunakan oleh Departemen Pendidikan Perencanaan dan persiapan kebutuhan kebijakan lembaga pemangku kepentingan di tingkat kabupaten / kota dan sekolah-sekolah dan bahkan individu-individu di data kebutuhan manajemen. Perangkat lunak yang sekarang terbatas dan kondisi sangat jarang adalah software yang dapat dengan mudah dipahami dan tampilan yang sederhana, namun memiliki sejumlah manfaat yang banyak dalam persiapan dan kebutuhan informasi kegiatan program Renstra SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten / kota.

Dari temuan data tersebut baris berikut pengembangan perangkat lunak seperti SP2Renstra telah diuji dan cukup memperoleh tanggapan positif dari para pemangku kepentingan perencanaan dan petugas data dan informasi yang berkaitan dengan semua kepraktisan. Visualisasi adalah sebagai berikut ..

SP2RENSTRA

PENCARIAN
CARI

REPORT TINGKAT SEKOLAH
REPORT

MASTER
Kecamatan
Sekolah
Desa/Kelurahan
Kabupaten/Kota

DATA ENTRI
ENTRI DATA

MASTER IAMA SEKOLAH
Kabupaten/Kota : Sukabumi
Kecamatan : [Dropdown]

No	Kode	Sekolah	Desa	Kec.	Kab.	Status	Tingkat	Operasi
1.	35	SDN WARUNGWARU	33	9	3	1	2	[del]
2.	34	SDN PANYINANGAN	32	8	3	1	2	[del]
3.	33	SDN GANDASOLI	31	8	3	1	2	[del]
4.	32	SDN CIJULANG	15	6	3	1	2	[del]
5.	31	SDN BABAKAN	27	6	3	1	2	[del]

SP2RENSTRA

PENCARIAN
CARI

REPORT TINGKAT SEKOLAH
REPORT

MASTER
Kecamatan
Sekolah
Desa/Kelurahan
Kabupaten/Kota

DATA ENTRI
ENTRI DATA

MASTER IAMA SEKOLAH
Kabupaten/Kota : Sukabumi
Kecamatan : SURADE
Desa/Kelurahan : LINGGAJAYA
Nama Sekolah : SDN 1 NAGRAK
Tingkat Sekolah : SD/MI
Status Sekolah : Negeri
[simpan]

No	Kode	Sekolah	Desa	Kec.	Kab.	Status	Tingkat	Operasi
1.	35	SDN WARUNGWARU	33	9	3	1	2	[del]
2.	34	SDN PANYINANGAN	32	8	3	1	2	[del]
3.	33	SDN GANDASOLI	31	8	3	1	2	[del]



PENCARIAN

CARI

REPORT TINGKAT SEKOLAH

REPORT

MASTER

Kecamatan
Sekolah
Desa/Kelurahan
Kabupaten/Kota

DATA ENTRI

ENTRI DATA

Pencarian Data Sekolah

No.	Kode	Nama Sekolah	Kecamatan	Status
1.	31	SDN BABAKAN	BABAKAN	Negeri
2.	11	SDN BAGASIH	BAGASIH	Negeri
3.	8	SDN CIHAURKUNING	CIHAURKUNING	Negeri
4.	32	SDN CIJULANG	CIJULANG	Negeri
5.	10	SDN 3 CIPEUNDEUY	CIPEUNDEUY	Negeri
6.	6	SDN 2 CISAAT	CISAAT	Negeri
7.	7	SDN 3 CITANGLAR	CITANGLAR	Negeri
8.	9	SDN CIMWARUHILIR	CIMWARUHILIR	Negeri
9.	33	SDN GANDASOLI	GANDASOLI	Negeri
10.	4	SDN LINGGAJAYA	LINGGAJAYA	Negeri
11.	24	SDN ANGGARADUIN	NAGRAK	Negeri
12.	17	SDN NYAMBI LING	NAGRAK	Negeri

Jika Anda ingin memperoleh data yang lebih lengkap untuk setiap data sekolah misalnya, entri data juga harus selengkap mungkin. Dari beberapa temuan dari responden berpikir bahwa ini diuji, menunjukkan bahwa aspek-aspek kebutuhan tampilan data ada yang harus ditampilkan dengan grafis. Hal ini telah menjadi terkenal karena tim peneliti dapat mengembangkan lebih sempurna.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

a. Kesimpulan

Dari hasil temuan penelitian dan diskusi yang telah dilakukan oleh tim peneliti, maka kesimpulan dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Berdasarkan temuan dan pembahasan pada bab sebelumnya, kemudian dari studi ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebutuhan sistem pemetaan program lembaga pendidikan yang strategis dan akan segera terpenuhi, terutama untuk kebutuhan pengembangan program kebijakan yang terkait dengan perumusan sejumlah langkah-langkah yang harus berdasarkan data dan informasi yang akurat untuk menghasilkan sebuah master plan Renstra SKPD Dinas Pendidikan adaptif.
2. Pengembangan desain database sistem yang mendukung proses pemetaan sejumlah program untuk Rencana Strategis Departemen Pendidikan multi-tahun, dapat dilakukan dengan menganalisis kebutuhan dan sistem perangkat lunak pendukung energi yang telah dimiliki, seperti dalam studi ini diperlukan bila SP2Renstra perangkat lunak dinas pendidikan kabupaten / kota sebelumnya DPISS, dari temuan dan hasil dari rancangan sistem database dalam studi ini telah mampu memperbaiki kebutuhan SKPD dinas pendidikan pemangku kepentingan, khususnya tim Renstra dan perencanaan dan data informasi .
3. Desain, pengembangan dan pengujian serta upaya untuk mensosialisasikan perangkat lunak Sistem Pengumpulan Data berbasis DPISS Berencana, diperlukan untuk menetapkan tingkat reliabilitas dan validitas pengguna software itu sendiri, seperti dalam studi ini akhirnya dapat diproduksi sebagai perangkat lunak SP2Rnstra perangkat lunak sederhana mampu perangkat lunak pemetaan kebutuhan data yang lengkap untuk

pengembangan kegiatan perencanaan program strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kota.

b. Saran

Dari serangkaian kegiatan penelitian yang dapat menyelesaikan tim peneliti, masih ada kekurangan yang harus berpikir bersama-sama, terutama dalam hal waktu dan produksi perangkat lunak itu sendiri. Selain melihat hal-hal yang masih sangat dibutuhkan adalah sebuah isu dengan pengujian bagi para pemangku kepentingan yang harus lebih serius dalam menanggapi segala bentuk inovasi dan bersama-sama mampu berpikir tentang pentingnya inovasi ini. Berdasarkan kondisi empiris ini dapat beberapa tim nasihat tujuan mencakup:

1. Untuk Pihak LPPM

Stranas program penelitian harus menjadi alat untuk mengukur asli temuan dari para peneliti yang benar-benar ingin untuk penelitian dan produk-oriented. Untuk itu silahkan dukungan kerjasama dalam satu mendaftar untuk sebuah produk unggulan peneliti.

2. Direktorat Jenderal DP2M

Dari sistem penelitian saat ini terutama untuk Batch-aku Stranas kita sebagai peneliti harus diberikan kesempatan untuk membuat presentasi saat evaluasi adalah bahwa ia menghargai kesempatan dalam temuan. Ini berarti bahwa waktu seharusnya menjadi evaluasi serius dari semua tema penelitian diberi waktu untuk hadir di hadapan hakim, sehingga objektivitas dapat diperoleh dalam produk yang akan dibantu untuk mendaftarkan hak paten.

3. Departemen Pendidikan untuk Kabupaten / Kota.

Departemen pendidikan harus lebih kooperatif dalam melakukan sesuatu bentuk kerjasama dalam inovasi manajemen, khususnya pengumpulan data dan sistem manajemen informasi sehingga dari tahun ke tahun data kepatuhan dan perumusan kebijakan Renstra selalu dapat terpenuhi dengan kualitas data diperbarui, dalam bentuk perangkat lunak manajemen data berbasis.

4. Pemerintah Kabupaten / Kota.

Renstra sehubungan dengan rumusan pemerintah daerah harus ikut menjadi penelaah atau terlibat dalam proses merumuskan atau bahkan awal pengumpulan data dan pengiriman segala bentuk kebutuhan tim penyusunan Renstra khususnya dalam hal pembiayaan, infrastruktur dan dukungan yang senantiasa mengembangkan adaptif perangkat lunak yang diperlukan.

5. Untuk Pengguna Lingkungan Dinas Pendidikan.

Sehubungan dengan produk dari penelitian ini membentuk SP2Renstra untuk para perumus dari Renstra Disidik Kabupaten / kota harus memiliki daya analisis dan mengembangkan kemampuan mereka sendiri, yang berarti perangkat lunak sistem basis data akan mampu menghasilkan yang terdefinisi dengan baik jika didorong dari kerjea pengalaman para pemangku kepentingan di lingkungan dinas pendidikan. Kemudian silakan gunakan perangkat lunak dalam produk penelitian ini dapat digunakan sebagai sistem database utama, karena sistem database ini dapat online dan offline.

6. Untuk penelitian lebih lanjut.

Dalam mengembangkan suatu produk harus selalu didasarkan pada kebutuhan lapangan, dan mampu diselesaikan untuk menghasilkan output yang berorientasi akademis sehingga bekerja di lingkungan universitas secara signifikan dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dari dinas pendidikan.

REFERENCES

- Anderson, Jo Anne. (2005). *Accountability in Education*. Paris : The International Institute for Educational Planning, UNESCO.
- Brady, L. (1990). *Curriculum Development*. Sydney : Prentice Hall of Australian Limited.
- Borg, Walter R, and Gall, Meredith Damien. (1989). *Educational Research*. London: Longman.
- Dally, Dadang (2008). "Elemen Penting dalam Implementasi MBS dan Otonomi Daerah". Pokokok Sambutan pada *Lokakarya Diseminasi RKS oleh Pemda Kabupaten/Kota di Jawa Barat* tanggal 8 Juli 2008 di Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2001). *Kebijakan Pendidikan Dasar*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- _____, (2005). *Rencana Strategis Depdiknas 2005-2009*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.
- Desentralized Basic Education (DBE1), (2007). *Bagaimana Menyiapkan Rencana Kapasitas Pendidikan Kabupaten/Kota*. Jakarta : DBE-1 Management and Governance.
- Desentralized Basic Education (DBE1), (2007). *Panduan Penyiapan Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten/Kota (Renstra SKPD)* Jakarta : DBE-1 Management and Governance.
- Miller, JP and Seller Wayne. (1985). *Curriculum : Perspectives and Practices*. New York : Longman Inc.
- National Institute for Educational Research (NIER). (1999). *An International Comparative Study of School Curriculum*. Tokyo: NIER Publication.
- Jackson, Philip W. (1992). *Handbook of Research On Curriculum*. New York: Mcmillan Publishing Company.
- Oliva, Peter. F. (1992). *Developing Curriculum*. New York : Harper Collins Publisher.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008, tentang *Penuntasan Belajar Sembilan Tahun*.
- Pinar, William F. (2004). *What is Curriculum Theory ?* London : Lawrence Erlbaum Associates , Publishers.
- _____, (2003). *International Handbook of Curriculum Research*. London : Lawrence Erlbaum Associates , Publishers.
- Salam, Dharma Setiawan. (2004). *Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumberdaya*. Jakarta : Djambatan, 2004.
- Schubert, William. (1986). *Curriculum : Perspective, Paradigma, and Possibilities*. New York : Mcmillan Publishing Co.
- Tanner, D and Tanner, LN. (1980). *Curriculum Development : Theory into Practice*. New York : Macmillan Publishing Co, Inc.
- Tyler, R.W. (1949). *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. Chicago : The University of Chicago Pers.
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004, tentang *Rencana Pembangunan Nasional*.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Bank. (1998). *Education in Indonesia : From Crisis to Recovery*. Bangkok : Education Sector Unit. East Asia and Pasific Region Office.

DOKUMEN

- Inpres No 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
- Laporan Tahunan Program *Decentralized Basic Education Project West Java and Banten*. 2007/2008.
- Laporan *Baseline Data Decentralized Basic Education West Java and Banten*, Bandung, 2007.

Managing Basic Education, *USAID –Kerjasama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.*
Dinas Pendidikan Jateng.

PP No 38 tahun 2007 *tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan wajib daerah kabupaten/kota dalam bidang pendidikan.*

PP No 19 tahun 2005 *tentang Standar Nasional Pendidikan, layanan dan output pendidikan Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional, Tahun 2005-2009.*

Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 *Tentang Peraturan Pemerintah yang mengatur tata cara penyusunan dokumen perencanaan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah.*
Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional

